



**PKL MALIOBORO MENGADU KE DPRD** Pedagang kaki lima Malioboro membawa poster saat audiensi dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1/2022). Pedagang kaki lima Malioboro mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta terkait rencana relokasi PKL ke tempat baru yakni di bekas Bioskop Indra dan lahan eks Dinas Pariwisata Yogyakarta pada awal Februari 2022. Pedagang kaki lima meminta penundaan relokasi satu hingga tiga tahun mendatang.

## PKL Malioboro Minta Penundaan Relokasi

Selama pandemi Covid-19 kondisi ekonomi PKL Malioboro sangat terdampak.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Relokasi pedagang kaki lima (PKL) kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta tetap bergulir yang direncanakan dilakukan mulai awal Februari 2022. Namun, para PKL Malioboro mendesak pemerintah kota setempat agar relokasi ditunda setidaknya satu tahun hingga tiga tahun.

Nantinya, relokasi PKL akan ditempatkan di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY. Data dari asosiasi pedagang, total sekitar 2.336 PKL yang tercatat di sepanjang Malioboro.

"Kami tidak menolak kebijakan relokasi, tetapi meminta penundaan pelaksanaannya," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY), Wawan Suhendra, di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1).

Ada beberapa alasan PKL meminta agar proses relokasi tersebut ditunda. Pertama, yakni terkait de-

ngan Kondisi ekonomi PKL. Wawan menyebut, selama pandemi Covid-19 kondisi ekonomi PKL di kawasan Malioboro sangat terdampak.

"Memundia waktu relokasi supaya tempat di mana kami akan direlokasi benar-benar siap dan memadai sesuai dengan jumlah dan jenis dagangan kami di tempat semula, begitu pula fasilitas akses bagi pengunjung," katanya.

Pada enam bulan pertama Covid-19, pedagang terpaksa diliburkan. Pada saat PPKM level 4 diterapkan di DIY, pedagang dilarang berjualan.

Namun, pada saat PPKM turun level menjadi level 2 di DIY, kondisi ekonomi pedagang perlahan mulai bangkit. Saat mulai bangkit, PKL secara mendadak direncanakan untuk direlokasi.

Padahal, katanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tengah sibuk untuk membangkitkan UMKM dan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita semua tahu, kalau dipindah minimal butuh waktu satu sampai dua tahun untuk memulihkan kembali ekonomi seperti di tempat semula. Keluarga kami mau diberi makan apa, pendidikan anak kami bagaimana, utang-utang kami siapa yang dapat melunasi," ujar Wawan.

Alasan kedua relokasi ini diminta untuk ditunda dikarenakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi yang jelas terkait lokasi baru penempatan PKL. Besarannya berapakah kapasitas lokasi baru untuk menampung PKL juga belum disampaikan secara terbuka dan PKL juga belum diajak untuk meninjau lokasi yang baru.

"Justru dari informasi sepotong-potong yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta, kami menyimpulkan besaran lapak dagangan kami (yang baru) sangat tidak memadai. Bahkan, karakter kami berdagang tidak diakomodir," jelasnya.

Menurut Wawan, akar dari permasalahan tersebut terjadi karena lokasi relokasi yang sudah dibuat terlebih dahulu dan baru dilakukan pendataan jumlah PKL dan jenis dagangannya. Hal ini menyebabkan pedagang dipaksakan untuk melaku-

kukan penyesuaian dengan tempat relokasi.

Alasan ketiga PKL meminta relokasi ditunda yakni relokasi yang dinilai dilakukan secara mendadak. Sosialisasi relokasi ini baru dilakukan pada pertengahan November 2021, artinya rentang untuk menyiapkan relokasi hanya satu bulan lebih.

Terkait rencana relokasi PKL Malioboro, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti belum mau berkomentar banyak. Pihaknya masih harus melakukan pendataan dan peninjauan lokasi sebelum relokasi dilakukan.

"Saya belum bilang mulai relokasi kapan, saya akan melihat dulu lokasi dari penataan ini, apakah di Indra sudah layak dan di shelter sebelah selatan Hotel Garuda (eks Dinas Pariwisata) itu layak. Masih ada 13 hari (hingga 1 Februari) kok sudah bicara kemungkinan (akan direlokasi saat itu)," kata Haryadi.

Selain itu, Haryadi juga belum bisa memastikan kapasitas PKL yang dapat ditampung di lokasi baru tersebut. Yang pasti, kapasitas lokasi baru tersebut lebih terbatas.

■ ed : yusuf.assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005